



BAPPEDA GRESIK
CV. TRITUNGGA CIPTA
CONSULTINDO

2022

LAPORAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	4
1.3	Ruang Lingkup Pekerjaan	5
2	ANALISA PERKEMBANGAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK	7
2.1	Komitmen Global dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	7
2.2	Kebijakan Nasional dalam membangun Pendidikan Berkualitas	10
2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan dalam Nawakarsa Gresik Baru	16
2.3.1	Kondisi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik	16
2.3.2	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gresik	23
3	METODOLOGI	29
3.1	Penentuan Model Indeks Pendidikan	30
3.2	Evaluasi, Review, dan Validasi Model Indeks Pendidikan	33
3.3	Pengukuran Dimensi tiap Model dan Indexing	36
4	ANALISA DAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK	38
4.1	Model Pengukuran Indeks Pendidikan	38
4.2	Hasil Pengukuran Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021	47
5	REKOMENDASI	61

Daftar Tabel

1.1	Arsitektur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	2
1.2	Target Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik	4
2.1	Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan	11
2.2	Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021	22
2.3	Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	23
2.4	Arah Kebijakan terkait Pendidikan di Kabupaten Gresik	25
2.5	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik	27
2.6	Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas	28
4.1	Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan	42
4.2	Capaian Indeks pendidikan per dimensi	47
4.3	Capaian Indeks Pendidikan per Alat Ukur	47

Daftar Gambar

2.1	Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas	9
2.2	Kebijakan Merdeka Belajar	14
2.3	Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi	16
2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Gresik	17
	Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2020	
2.5	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021	19
2.6	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional	20
2.7	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	21
2.8	Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	21
3.1	Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan	30
4.1	Citasi publikasi data pendukung jurnal	40

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Penyusunan indeks pendidikan Kabupaten Gresik dilatarbelakangi untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada perioder 2021-2026, Kabupaten Gresik berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru yang dituangkan dalam visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagaimana berikut:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan

Pembangunan Pendidikan terkait erat dan menjadi arah kebijakan utama dalam misi ke-4 yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Secara substansial, pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistik mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistik dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistik tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhlakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistik, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya

dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Pada tataran arsitektur kinerja, sebagai upaya untuk mencapai Misi IV ditetapkan tujuan pembangunan yaitu Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran (sasaran ke-7) yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”.

Tabel 1.1 Arsitektur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur
				Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Prevalensi Stunting Indeks Kesalehan Sosial
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor	Tingkat Kemiskinan Tingkat	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Tingkat

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
	Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	ketenagakerjaan	Pengangguran Terbuka	Kemiskinan	Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan arsitektur di atas, Indeks Pendidikan merupakan salah satu kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan” dimana dijabarkan target per tahun sebagaimana berikut:

Tabel 1.2 Target Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pendidikan	NA	78,2	79,8	80,8	81,7	82,7	83,6	83,6

1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud utama dalam penelitian ini adalah mengukur indeks pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026s sebagai salah satu kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran pembangunan ke-7 “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan” pada tujuan ke-4 Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah sebagai penjabaran dari misi ke-4 RPJMD yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menentukan perumusan konsep dan formulasi indeks pendidikan sebagai indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Mengukur indeks pendidikan tahun 2021, dan
3. Mendorong pemanfaatan indeks pendidikan sebagai strategi penguatan pelayanan pendidikan inklusif;

1.3

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan dalam penyusunan indeks pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah :

1. Perumusan model pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan termutakhir;
2. Pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik;

Sumber Pendanaan Pekerjaan Penyusunan Indeks Pendidikan Tahun 2022 pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Gresik, yakni :

- 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia .
- 5.01.03.2.01.03 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- Pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 5.1.02.02.09.0012 sebesar Rp. 96.500.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Landasan hukum dalam Penyusunan Indeks Pendidikan Tahun 2022 sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

BAB 2 ANALISA PERKEMBANGAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

2.1

Komitmen Global dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Pendidikan memungkinkan mobilitas sosial ekonomi ke atas dan merupakan kunci untuk keluar dari kemiskinan. Selama dekade terakhir, kemajuan besar telah dicapai untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan angka partisipasi sekolah di semua tingkatan, terutama untuk anak perempuan. Namun demikian, sekitar 260 juta anak masih putus sekolah pada tahun 2018 atau hampir seperlima dari populasi global dalam kelompok usia tersebut. Dan lebih dari separuh anak-anak dan remaja di seluruh dunia tidak memenuhi standar kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar negara mengumumkan penutupan sementara sekolah, yang berdampak pada lebih dari 91 persen siswa di seluruh dunia. Pada April 2020, hampir 1,6 miliar anak dan remaja putus sekolah. Dan hampir 369 juta anak yang bergantung pada makanan sekolah perlu mencari sumber lain untuk nutrisi harian. Belum pernah ada begitu banyak anak putus sekolah pada saat yang bersamaan, mengganggu pembelajaran dan menjungkirbalikkan kehidupan, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan. Pandemi global memiliki konsekuensi luas yang dapat membahayakan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam meningkatkan pendidikan global.

Pada September 2015, 193 pemimpin dunia berkomitmen pada 17 Tujuan Global untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan melindungi planet kita pada tahun 2030. Di bawah SDG 4 (tujuan ke-4), komunitas internasional telah berjanji untuk *“memastikan inklusifitas dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.”* Keberpihakan ini akan membutuhkan upaya luar biasa dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, donor dan organisasi internasional. Pendidikan adalah jantung dari agenda pembangunan global dan, seperti yang negara-negara Dunia harapkan, tujuan keempat pendidikan jauh lebih

ambisius daripada pendahulunya. Tujuan ke-4 perihal Pendidikan Berkualitas, secara umum, berupaya meningkatkan pendidikan melalui akses dan pemerataan yang lebih besar untuk semua usia peserta didik serta ruang belajar yang lebih baik dan lebih aman serta jumlah guru yang berkualitas lebih banyak.

Tujuan ke-4 melangkah lebih jauh dan melalui komitmen tingkat kebijakan, mengakui pentingnya Pendidikan dalam Keadaan Darurat dan kebutuhan untuk menangani kebutuhan pendidikan anak-anak dalam konflik dan krisis. Target 4.5 khususnya, "...berusaha memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan." Selain itu, Target 4.a berupaya melindungi fasilitas pendidikan dari serangan dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Target 4.5 dan 4.a memastikan bahwa anak-anak di daerah yang terkena dampak krisis berada dalam agenda SDG4 di tingkat nasional dan global. Database Ketimpangan Dunia tentang Pendidikan (WIDE) menunjukkan bahwa, di 94 negara, yang terkaya telah menyelesaikan setidaknya 12 tahun pendidikan (target SDG) di 36 negara, tetapi hal yang sama hanya dapat dikatakan untuk yang termiskin di 3 negara. Laporan Pemantauan Pendidikan Global (GEM) telah melakukan banyak pekerjaan untuk membantu mengungkap sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh kaum terpinggirkan, menunjukkan bahwa:

1. yang termiskin empat kali lebih mungkin putus sekolah dan lima kali lebih mungkin tidak menyelesaikan pendidikan dasar daripada yang terkaya.
2. proporsi anak putus sekolah di negara-negara yang terkena konflik telah meningkat sejak tahun 2000.
3. hampir dua pertiga orang dewasa dengan keterampilan literasi minimal adalah perempuan.
4. 40% dari populasi global tidak menerima pendidikan dalam bahasa yang mereka gunakan atau pahami
5. anak-anak pengungsi lima kali lebih mungkin putus sekolah daripada non-pengungsi;
6. baik sekolah menengah pertama universal maupun sekolah menengah atas universal tidak akan tercapai pada tahun 2030 dengan tingkat kemajuan terkini. Diproyeksikan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tingkat penyelesaian sekolah menengah bawah akan menjadi 76% pada tahun 2030, sementara tingkat 95% hanya akan dicapai pada tahun 2080-an.

Pendidikan adalah jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: pendidikan diidentifikasi sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 4) dan juga hadir sebagai target di bawah SDG lainnya tentang kesehatan,

pertumbuhan dan lapangan kerja, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan perubahan iklim. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan harus bertujuan pada pengembangan penuh kepribadian manusia, dan mempromosikan saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian. Pendidikan harus melampaui keterampilan membaca dan menghitung dasar, dan membekali individu dengan keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif, sambil membangun rasa ingin tahu, keberanian, dan ketahanan. Pendidikan adalah barang publik, di mana negara adalah pengembannya. Pendidikan adalah upaya masyarakat bersama, yang menyiratkan proses inklusif perumusan dan implementasi kebijakan publik, di mana masyarakat sipil, guru dan pendidik, sektor swasta, masyarakat, keluarga, pemuda dan anak-anak memiliki peran penting. Peran negara sangat penting dalam menetapkan dan mengatur standar dan norma. Kesetaraan gender terkait dengan hak atas pendidikan untuk semua. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan pendekatan berbasis hak yang memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki tidak hanya mendapatkan akses dan menyelesaikan siklus pendidikan, tetapi juga diberdayakan secara setara di dalam dan melalui pendidikan.



Gambar 2.1 Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas

2.2

Kebijakan Nasional dalam membangun Pendidikan Berkualitas

Kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, pemenuhan *pelayanan dasar termasuk layanan pendidikan* dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ternyata masih ditemukan berbagai masalah krusial dalam pembangunan Pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2018, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19 persen (Susenas, 2018). Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil yang mencerminkan kualitas Pendidikan Indonesia masih terbelakang jika merujuk pada data

kualitas Pendidikan berdasarkan hasil survei PISA yang merupakan salah satu dasar rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. PISA sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Untuk nilai kompetensi Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai Sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir. Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen).

Belum optimalnya pembangunan kualitas pendidikan ini berdampak secara langsung terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing manusia Indonesia. Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia

Tabel 2.1 Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan

No	Indikator	Baseline (2018)	Target 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89
3.	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%)		
	a.SD/MI/ sederajat	91,80	94,78
	b.SMP/MTs/ sederajat	81,70	89,49
		61,52	76,47

No	Indikator	Baseline (2018)	Target 2024
	c.SMA/SMK/MA/ sederajat	(Susenas 2018)	
4.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63
5.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
6.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya		
	a. SMA/SMK/MA/Sederajat	0,67	0,78
	b. Pendidikan Tinggi	0,16 (Susenas 2018)	0,23

Untuk mencapai target kinerja pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada Tahun 2024, Pemerintah mencanangkan 5 (lima) strategi dalam pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas Pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya

- rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti Pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan Pendidikan
 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integrative (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam Pendidikan gizi untuk anak sekolah.



Gambar 2.2 Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

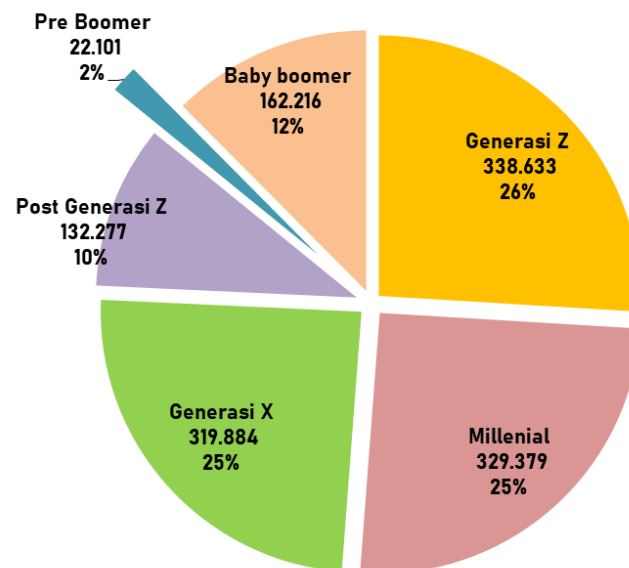
Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan dalam Nawakarsa Gresik Baru

2.3.1 Kondisi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Pada era sekarang struktur penduduk menjadi salah satu pondasi pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat dominasi penduduk Kabupaten Gresik adalah generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,96 persen dari total penduduk (339 ribu orang), milenial sebanyak 25,25 persen dari total penduduk (329 ribu orang), dan generasi X sebanyak 24,52 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik (320 ribu orang). Ketiga generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.

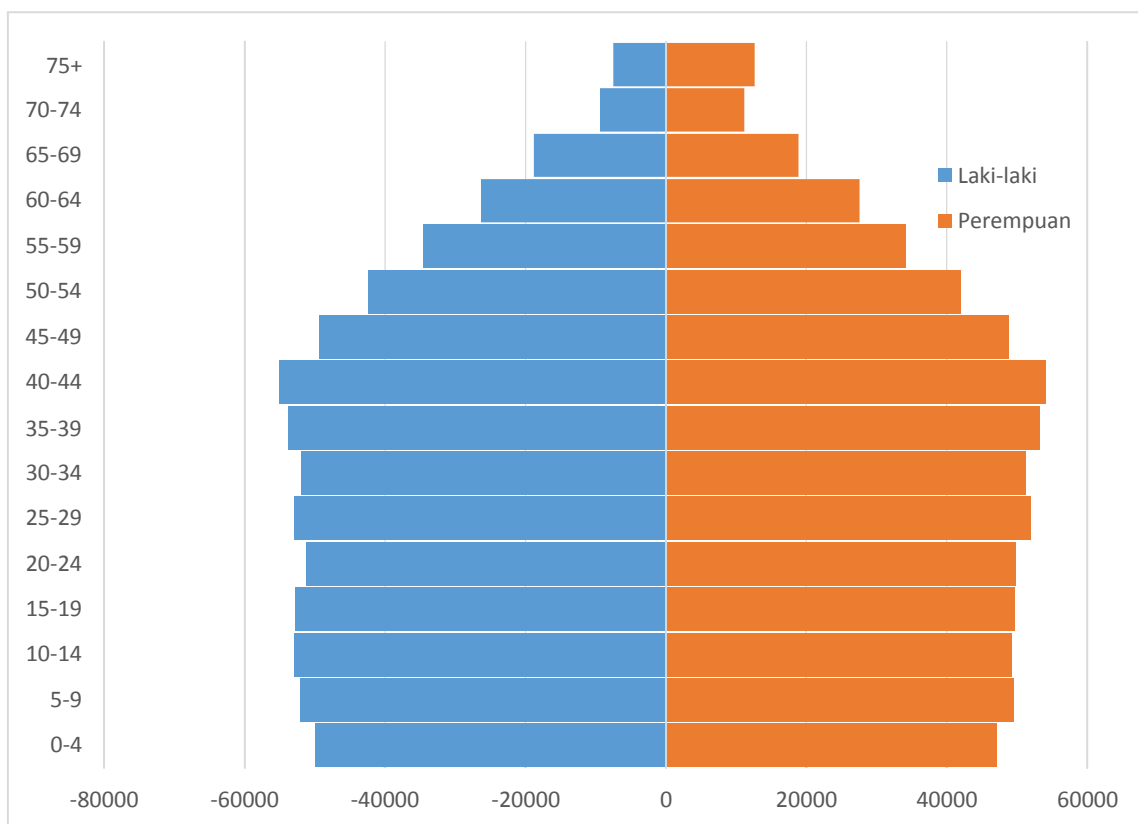


Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa terdiri dari 660.624 laki-laki dan 654.271 perempuan. Pada Tabel 2.11 Jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,71% dari tahun 2020 atau sejumlah 22.501 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 0.45% pada tahun 2019 atau sebanyak 5.790 jiwa. Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas.

Selain itu penurunan ini juga juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Median umur penduduk Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 29,29 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik adalah 45,01. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 45 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 44,10 sementara di daerah perdesaan 46,38.



Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2020

Jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 adalah 685.213 orang, yang terdiri dari 429.485 laki-laki dan 255.728 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah yang bekerja adalah 628.952 orang dan pencari kerja sebesar 56.261 orang. Dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 1.029.986 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik adalah 66,5 persen, dimana TPAK laki-laki adalah 84,8 persen dan TPAK perempuan sebesar 48,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menggambarkan persentase

penganggur terhadap total angkatan kerja adalah 8,2 persen, dimana TPT laki-laki adalah 8,0 persen, sedangkan TPT perempuan adalah 8,5 persen. TPAK mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

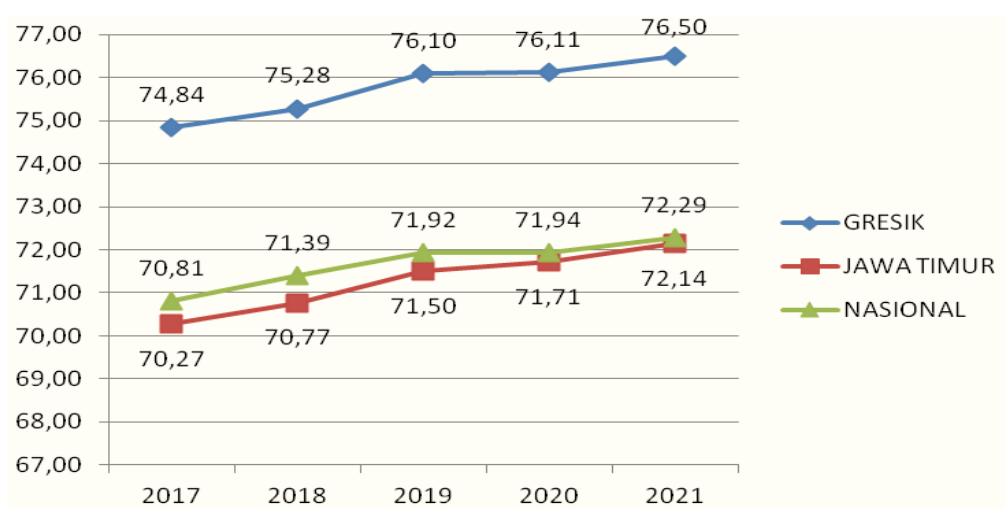
Ditinjau dari indeks pembangunan manusia¹, pembangunan manusia Gresik selalu mengalami peningkatan secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2021 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,35 menjadi 72,29. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami

¹ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM mengacu pada variabel dalam IPM metode baru dengan indikator sebagai berikut:

- a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* – e0)
Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
- b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS)
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 72,14 yang semula 71,71 di Tahun 2020.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tercatat sebesar 76,11 meningkat menjadi 76,50 pada Tahun 2021 atau sebesar 0,39. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

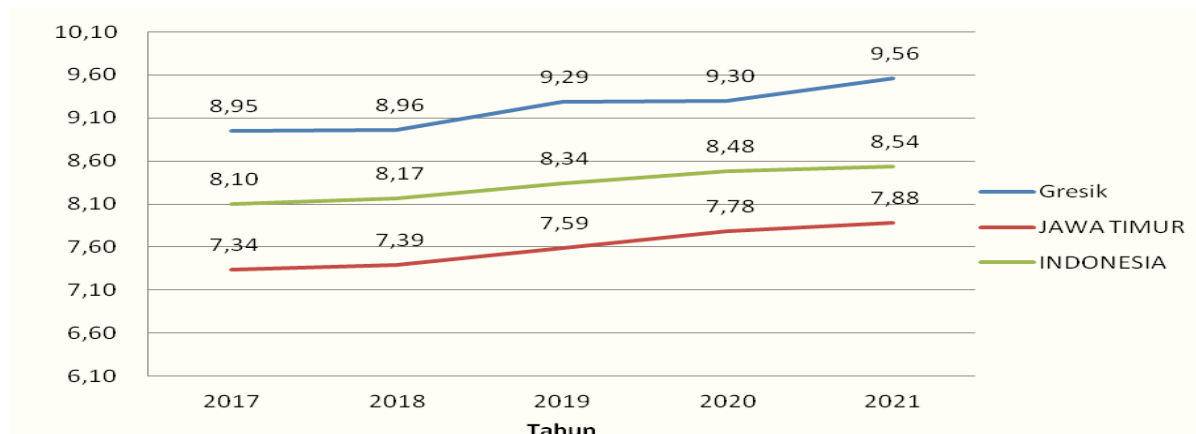
Ditinjau dari indikator pembentuk dalam dimensi Pendidikan pada indeks pembangunan manusia yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS)² dan Angka Harapan Lama Sekolah³ menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mengalami peningkatan

² Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

³ Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat

secara konsisten meskipun tidak signifikan. Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 7,88 tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 7,88 tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,56 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederajat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selayaknya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0.13 tahun yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya.

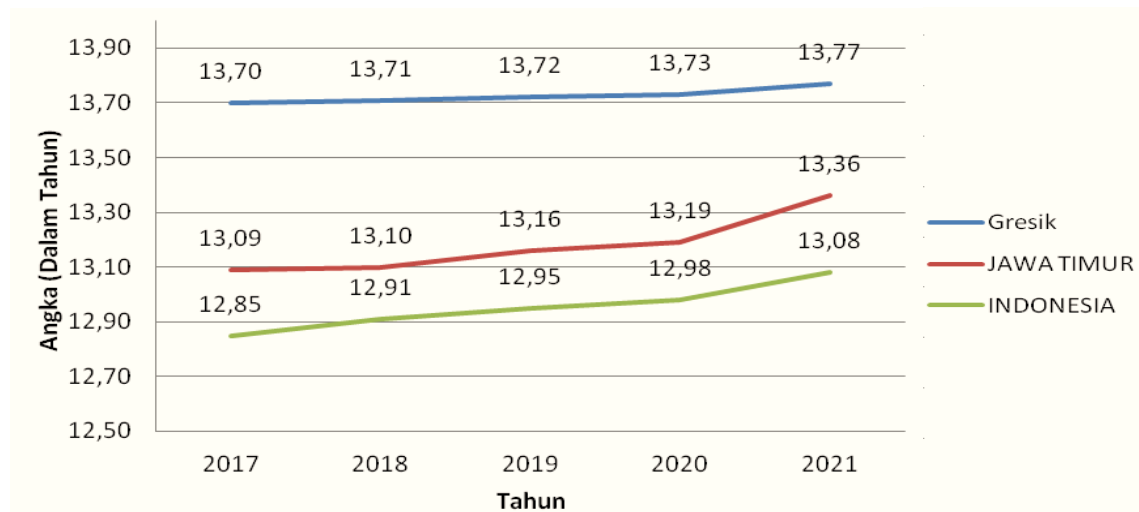


Gambar 2. 6 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0.08 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,36 tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,08 tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,77 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh

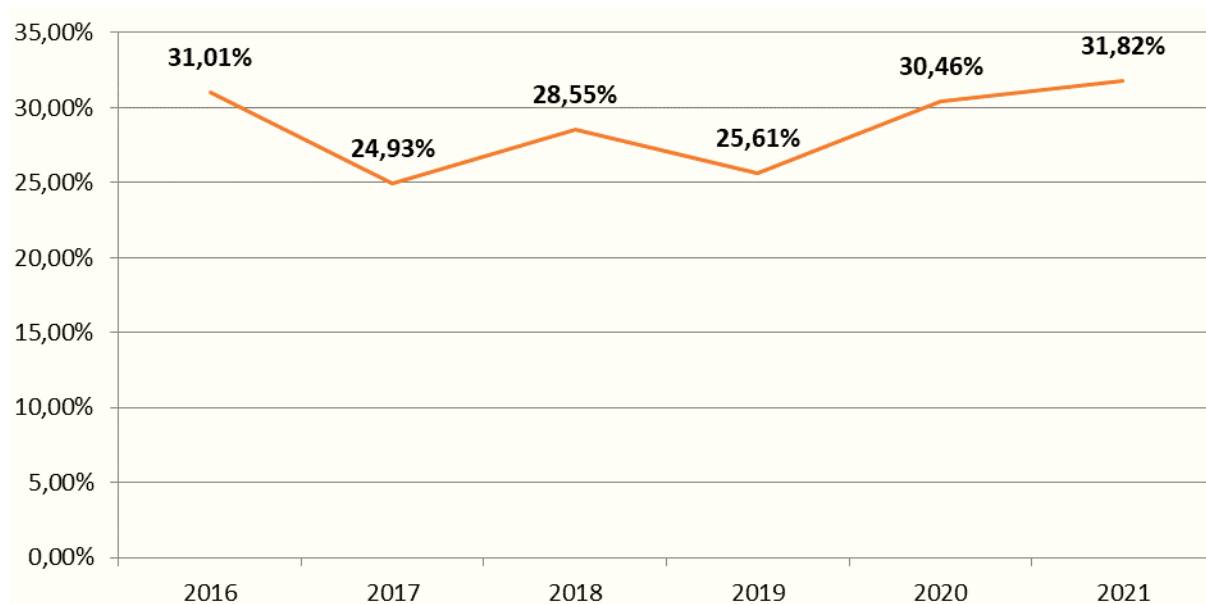
dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

penduduk di Kabupaten Gresik adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.



Gambar 2. 7 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Komitmen Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan dapat ditinjau dari alokasi anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, rata-rata alokasi anggaran Pendidikan mencapai 28,73% atau telah lebih dari ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 dengan rasio tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 31,82% dan rasio terendah pada tahun 2017 sebesar 24,93%.



Gambar 2. 8 Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Gresik. Selain angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang masih tertinggal dari negara maju terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan faktual antara lain:

- (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19
- (2) Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
- (3) Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata
- (4) Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;
- (5) Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi
Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
- (6) Masih tingginya angka putus sekolah
- (7) Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer
- (8) Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran
- (9) Bantuan dana Pendidikan belum maksimal

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 95,04%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,66% atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 72,10%. Dari Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 44.981 siswa. Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 9,47 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun. Adapun rekapitulasi kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan dirumuskan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
----	---------	------	------	------	------	------

No	Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD dan Sederajat	98,76%	94,58%	95,04%	96,67%	98,66%
2.	APM SMP sederajat;	82,43%	66,94%	72,10%	74,77%	99,24%
3.	Angka Kelulusan SD dan Sederajat	100%	96,99%	98,72%	99,97%	
4.	Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	100%	95,38%	97,51%	99,97%	
5.	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	
6.	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	
7.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD)	75,53%	89,30%	76,63%	75,95%	92,88%
8.	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan	100%	88,59%	88,29%	96,76%	
9.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	52,83%	41,01%	95,08%	89,07%	97,03
10.	Persentase Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B	95,95%	96,31%	96,94%	97,33%	
11.	Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B	88,78%	91,87%	92,49%	87,45%	

2..3.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Kebijakan dan arah strategi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gresik tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai penerjemahan dari misi ke-4 “*Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah*” dalalam sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & Kesehatan yang akan dicapai dengan strategi Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlatur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 2.3 Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”		
Tujuan	Sasaran	Strategi

T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlakul karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	

Permusan strategi pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik disusun berdasarkan kertas kerja Analisa SWOT⁴ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Selanjutnya strategi Pendidikan dirumuskan dan diarahkan dengan arah kebijakan pembangunan harus didasarkan yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin

⁴ Kertas Kerja Analisa SWOT Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Strength	weakness
Komitmen pemerintah Gresik Baru dalam melaksanakan SDG'S pada goals pendidkan	Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Bantuan dana Pendidikan belum maksimal
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat mencapai 96,67%,	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat mencapai 72,10
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mecapai 69,43 meningkat konsisten	Rasio guru terhadap peserta didik belum memadai
Angka Kelulusan SD dan Sederajat 99,97%, Angka Kelulusan SMP dan Sederajat 99,997%, Angka Putus Sekolah SD Sederajat 0,01%, Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 0,07%	Indeks minat baca daerah dan kunjungan ke perpustakaan rendah Pendidikan inklusif belum merata untuk seluruh kecamatan
Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B sebesar 97,93%	Aksesibilitas peserta didik dan masyarakat terhadap buku digital rendah
Sekolah SMP/MTS sederajat terakriditaso minimal B 87,45%	Kurikulum muatan lokal belum memiliki <i>linkage</i> dengan dunia
Opportunity	Threat
Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), <i>big data analytics</i> dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>);	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital Pandemi Covid-19
Nilai Kabupaten Layak Anak pada Kategori Madya.	Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet	Pemanfaatan internet dan Interaksi di media sosial cenderung tanpa pengawasan

timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan Pendidikan di setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.4 Arah Kebijakan terkait Pendidikan di Kabupaten Gresik

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakhul karimah
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonmi dan kesiapan sdm yang unggul & berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
2025	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan daya saing wilayah serta terjaminnya pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
2026	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakhul karimah
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	

Arah Kebijakan terkait dengan Pendidikan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dituangkan dalam rumusan program pembangunan Daerah yang klasifikasikan menjadi Belanja Wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

- (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Belanja wajib yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah mencapai setengah dari kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah sedangkan alokasi anggaran fungsi Pendidikan mencapai 24-25%. Meskipun masih diatas ambang batas standar alokasi ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 namun masih di bawah rerata alokasi anggaran Pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 28,73%.

**Tabel 2.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Gresik**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja wajib	51%	50%	50%	50%	48%	48%
Pendidikan	25%	25%	24%	24%	24%	24%
Kesehatan	13%	10%	10%	10%	10%	10%
Infrastruktur	25%	33%	36%	38%	32%	34%

Pembangunan pelayanan pendidikan juga dituangkan dalam Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik

Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari sedangkan nawakarsa yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan adalah Gresik Cerdas. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakarsa Gresik Cerdas dirumuskan dalam berbagai output kunci sebagaimana berikut:

Tabel 2.6 Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
6	Gresik Cerdas	Insentif pendidikan untuk siswa SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadi pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkat potensi serta infrastruktur pendidikan dipulau bawean	Program Pengelolaan Pendidikan
		Mendirikan akademi komonitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

BAB 3 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah mix method atau campuran^{5,6} antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), *Content Analysis* dan *Peer Review* (Gremner, 2009) sedangkan pendekatan kuantitatif meliputi *confirmatory & exploratory factor analysis*, survey dan *indexing*.

5 Perbedaan Fundamental dalam Filosofi-Filsafat Dasar

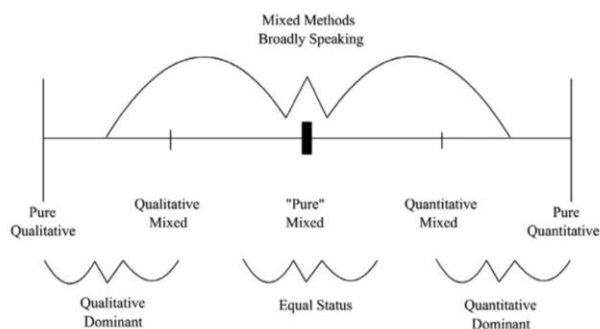
Semua sains didasarkan pada pemikiran paradigmatik yang melibatkan (Guba dan Lincoln, 1994).

- (1) asumsi-asumsi berbeda di hakikat realitas (ontologi),
- (2) bagaimana kita dapat mengetahui realitas itu (epistemologi),
- (3) bagaimana kita secara sistematis dapat mengakses apa yang dapat diketahui tentang realitas itu (metodologi)

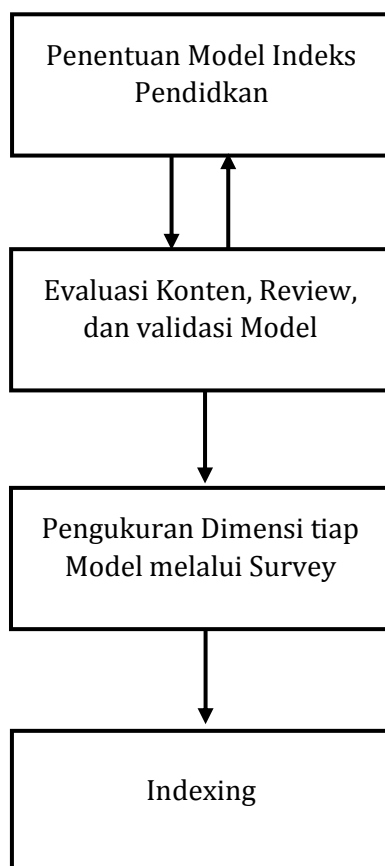
Aspek	Functionalism -Quantitative	Interpretivism -Qualitative
Tujuan	Pengujian dan penyempurnaan teori	Memahami suatu fenomena / membuat teori baru
Data dan analisis	Meniru penelitian sebelumnya dengan cermat	Unik tetapi harus masuk akal dan masuk akal
Teori	Terutama gunakan teori yang ada	Kembangkan teori baru
Ontologi	Objektivitas peneliti sebagai pengamat eksternal	Subyektivitas peneliti sebagai pengamat internal
Epistemologi	Pencarian positivisme untuk keteraturan dan hubungan sebab akibat antar variabel	Relativisme cari yang terbaik penjelasan dari suatu fenomena
Metodologi	Pengumpulan data kuantitatif dan Analisis statistik	Data kualitatif (multi mode data) dan Grounded Theory

⁶ Berdasarkan analisis tentang berbagai definisi, Johnson et al (2007) menawarkan yang definisi umum yaitu: Metode penelitian campuran adalah jenis penelitian yang dilakukan peneliti atau tim peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (misalnya, penggunaan kualitatif dan sudut pandang kuantitatif, pengumpulan data, analisis, teknik inferensi) untuk tujuan pemahaman yang luas dan pembuktian yang luas dan mendalam.

Graphic of the Three Major Research Paradigms, Including Subtypes of Mixed Methods Research



Secara garis besar kerangka kerja penyusunan Index Pendidikan dilaksanakan sebagaimana berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan

3.1 Penentuan Model Indeks Pendidikan

Perumusan model indeks pendidikan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), Pendekatan *SLR* dimanfaatkan pada tahapan penelaahan penelitian untuk merumuskan kerangka konseptual dan dfinisi operasional indeks pendidikan Perumusan pendekatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Kerangka Penelitian
Tahap 1 Perencanaan Tinjauan	Kebutuhan Review Review terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan dimensi indeks pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman <i>evidence based</i> kualitas pendidikan dengan pertanyaaan penelitian bagaimanakah kerangka konseptual pengukuran mengenai kualitas pendidikan secara inklusif.

Tahapan	Kerangka Penelitian
	Pada penelitian ini, urgensi review dibutuhkan untuk menelaah perkembangan pengukuran kualitas pendidikan meliputi (a) rangkaian teori kualitas pendidikan (b) fenomena kualitas pendidikan, (c) determinan kualitas pendidikan, (d) model pengukuran kualitas pendidikan yang telah dikembangkan. Berbagai fakta yang didapatkan dari review penelitian ini akan disintesis menjadi kerangka indeks pendidikan Pengembangan Protokol Review (1) Pembahasan penelitian membahas tentang indeks pendidikan dengan kelengkapan bahasan memenuhi atau sebagian urgensi review; (2) Pembatasan penelitian pada ilmu sosial; (3) Populasi atau sample tidak dibatasi; (4) Kata kunci pencarian pada database Scopus dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci <i>Education Index, Education Quality, Education Quality Measurement, Education Practices Dimension</i>
Tahap 2 Pelaksanaan Review	Identifikasi Penelitian dan Pemilihan Studi Jurnal, Serial buku, dan prosiding konferensi yang menjadi tinjauan termuat dalam database Scopus. Berdasarkan pelaksanaan protokol ditemukan sebanyak 309 Jurnal pada database Scopus. Penilaian Kualitas Studi Penilaian kualitas⁷ mengacu pada penilaian validitas internal studi dan sejauh mana desain, perilaku, dan analisisnya telah meminimalkan bias atau

⁷ Penilaian kualitas dibedakan menjadi (2) dua cara yaitu;

- (1) Penelitian Kuantitatif menggunakan coba terkontrol secara acak dan desain kuasi-eksperimental;
- (2) Penelitian Kualitatif menggunakan checklist sebagaimana berikut :

(a)	Penanda utama: apakah penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna subjektif yang diberikan orang pada pengalaman dan intervensi tertentu?;
(b)	Kepekaan konteks: apakah penelitian telah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi peka / fleksibel terhadap perubahan yang terjadi selama penelitian?;
(c)	strategi pengambilan sampel: apakah sampel penelitian telah dipilih dengan cara yang disengaja dibentuk oleh teori dan / atau perhatian yang diberikan pada beragam konteks dan makna yang ingin dieksplorasi oleh penelitian ini?;
(d)	kualitas data: apakah sumber pengetahuan / pemahaman yang berbeda tentang masalah yang sedang dieksplorasi atau dibandingkan ?;
(e)	kecukupan teoritis: apakah para peneliti membuat secara eksplisit proses perpindahan mereka dari data ke interpretasi?;

Tahapan	Kerangka Penelitian
	kesalahan⁸. Penilaian kualitas studi pada penelitian ini didasarkan pada reputasi jurnal yang terindeks Scopus. Ekstraksi Data Pelaksanaan ekstraksi data dilakukan dengan penyusunan tabulasi secara berurutan meliputi: (1) Judul; (2) penulis; (3) Informasi publikasi (Jurnal, Tahun, DOI, dsb) (4) Kualitas Jurnal (indeks scopus) (5) Metodologi; (6) Informasi kunci yang menjawab urgensi studi literatur; (7) Sintesis; Sintesis Data Penyusunan sintesis data pada penelitian ini memanfaatkan meta sintesis. Meta sintesis menawarkan pendekatan interpretatif untuk sintesis penelitian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi teori, narasi besar, generalisasi, atau terjemahan interpretatif yang dihasilkan dari integrasi atau perbandingan temuan dari studi kualitatif.⁹ Perumusan metasintesis
Tahap 3 Pelaporan dan Diseminasi	Laporan dan Rekomendasi Penyusunan metasintesis diklasifikasikan dalam analisa tematik meliputi (a) rangkaian teori indeks pendidikan (b) determinan kualitas pendidikan (c) model pengukuran indeks pendidikan

(f)	generalisasi: jika klaim dibuat untuk generalisasi apakah ini mengikuti secara logis dan / atau teoritis dari data?
-----	---

⁸ Blaxter, 1996; Greenhalgh and Taylor, 1997; Mays and Pope, 2000; Popay, Rogers and Williams, 1998). Popay, Rogers and Williams (1998) dalam David Tranfield, David Denyer and Palminder Smart. *Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review*. British Journal of Management, Vol. 14, 207–222 (2003)

⁹ Sandelowski, M., S. Docherty, and C. Emden (1997). 'Qualitative Metasynthesis: Issues and Techniques'. *Research in Nursing and Health*, 20 (4), pp. 365–371.

3.2 Evaluasi, Review, dan Validasi Model Indeks Pendidikan

Proses evaluasi dan review model pengukuran indeks pendidikan dilaksanakan melalui analisis konten yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Secara umum, tujuan dari analisis isi adalah sistem klasifikasi untuk memberikan wawasan mengenai frekuensi dan pola faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diminati (Gremner, 2004). Untuk menguatkan hasil analisa konten maka dilaksanakan Penelaahan sejawat (peer review) adalah proses peninjauan atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang bersesuaian. Setelah tim peneliti menyelesaikan sebuah proyek penelitian, ia biasanya akan mengirimkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk manuskrip untuk diterbitkan secara resmi di jurnal ilmiah.

Mekanisme yang dilakukan untuk menilai validitas konten dari penelitian ini mengadopsi Teknik yang dilakukan MacKenzie et al. (1991) dengan melakukan pre-tes dari seperangkat item yang telah dikembangkan untuk mengukur konstruk bersama dengan definisi konstruk tersebut. Pada penelitian ini, salah satu proses item-sort task dilakukan dalam sesi kedua focus group discussion (FGD) dengan para ahli dalam proses pra-penelitian. Pengujian validitas konten dilakukan dengan meminta para ahli untuk mencocokkan item dengan definisi yang sesuai, serta menyediakan kategori “tidak terklasifikasi” untuk item yang ditentukan tidak sesuai dengan salah satu definisi. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penilaian validitas konten, dapat digunakan sejumlah sampel “mahasiswa doctoral” karena mahasiswa doctoral memiliki kemampuan analisis yang baik dan wawasan yang cukup luas sehingga dapat memposisikan diri sebagai representatif dari responden yang ditargetkan (Schriesheim et al., 1993; Anderson dan Gerbing, 1991). Untuk ukuran yang disarankan untuk tahapan item sort-task yaitu sejumlah 20 responden (Ferris et al., 2008)

Hasil penilaian validitas konten mengacu kepada MacKenzie, Podsakoff, dan Fetter (1991), dengan menggunakan indeks persetujuan (agreement index) validitas konten yang dapat diterima yaitu persentase responden yang mengklasifikasikan item-item dengan benar minimal 75%, sebelum akhirnya item siap disebarkan kepada responden. Agreement index 75% tersebut menunjukkan item-item yang memenuhi proporsi responden yang menetapkan item ke definisi yang tepat. Hasil dari validitas konten yang ditemukan adalah item-item yang diklasifikasikan pada definisi konstruk yang benar menunjukkan tingkat validitas konten yang lebih tinggi daripada item yang diklasifikasikan pada konstruk yang tidak tepat (Ferris et al., 2008). Dilakukannya penilaian validitas konten ini memberikan bukti "content adequacy" Schriesheim et al. (1993), bahwa item-item yang dipertahankan harus mewakili ukuran dari konstruk yang diteliti dan mengurangi kebutuhan untuk modifikasi item di tahap berikutnya.

Mekanisme Exploratory Factor Analysis

Setelah data telah dikumpulkan, diperlukan analisis faktor yang digunakan untuk lebih menyempurnakan item pengukuran yang baru dibentuk. Analisis faktor memungkinkan pengurangan item-item yang berdasarkan pada bukti validitas konstruk (Guadagnoli dan Velicer, 1988). Sebelum melakukan analisis faktor, telah dilakukan perhitungan korelasi antar variabel, dan setiap item yang berkorelasi kurang dari 0.400 dengan semua variabel lain dihapus dari analisis (Kim dan Mueller, 1978). Korelasi rendah menunjukkan item yang tidak diambil dari domain yang sesuai sehingga menghasilkan kesalahan dan tidak dapat diandalkan (unreliability) (Churchill, 1979).

Nilai item loadings pada faktor laten dapat menjadi bukti yang mendukung sebagai justifikasi teoritis untuk menentukan jumlah item yang dipertahankan. Nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (kriteria Kaiser) dan uji scree dari persentase varians digunakan untuk mendukung perbedaan teoretis. Peneliti mempertahankan item-item yang jelas termuat pada satu faktor yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi item yang paling jelas mewakili domain konten dari konstruk yang mendasarinya. Tidak ada aturan yang ketat untuk hal ini, tetapi tingkat kriteria 0.400 paling umum digunakan dalam menilai factor loading yang memenuhi kriteria (Ford et al., 1986). Item-item yang memenuhi persyaratan adalah item yang factor loadingnya lebih dari 0,40 dan atau dua kali lebih kuat pada faktor yang sesuai daripada pada faktor lainnya.

Tahap ini juga berguna untuk menilai statistik proporsi varians dalam variabel yang dijelaskan oleh masing-masing item dan mempertahankan item dengan komunalitas yang lebih tinggi. Persentase total varian item yang dijelaskan juga penting, semakin besar persentase varian item maka semakin baik. Tidak ada pedoman ketat untuk nilai item varian, tetapi 60% seringkali ditetapkan sebagai target minimum yang dapat diterima. Pada tahap ini, loading item yang tidak memenuhi standar telah dihapus, dan kemudian analisis diulangi kembali sampai terbentuk matriks struktur faktor yang menjelaskan persentase tinggi dari total varian item (Hinkin, 1998).

Confirmatory Factor Analysis

Selanjutnya pada tahap kelima yaitu penilaian psikometrik, data dianalisis dengan confirmatory factor analysis (CFA) untuk setiap sampel dengan alat analisis AMOS. Dalam pengembangan item pengukuran, analisis faktor konfirmatori berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa analisis sebelumnya telah dilakukan secara menyeluruh dan tepat (Hinkin, 1998). Hinkin (1998) menyarankan bahwa analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan menggunakan matriks varians-kovarians item yang dihitung dari data yang dikumpulkan dari sampel

independen. Pertama, untuk menilai goodness of fit dari model pengukuran membandingkan single common factor model dengan model multitrait dengan jumlah faktor yang sama dengan jumlah konstruk dalam ukuran baru (Joreskog dan Sorbom, 1989). Model multitrait membatasi setiap item untuk memuat hanya pada faktor yang sesuai. Tujuan kedua adalah untuk menguji kesesuaian setiap item dalam model yang ditentukan menggunakan indeks modifikasi dan nilai t . Selain itu, statistik chi-square merupakan penilaian kesesuaian model tertentu serta perbandingan antara dua model. Semakin kecil chi-square maka mengindikasikan semakin cocok (fit) model. Telah dikemukakan bahwa chi-square dua atau tiga kali lebih besar dari degrees of freedom dapat diterima (Carmines dan Mclver, 1981), tetapi kecocokan dianggap lebih baik jika semakin dekat nilai chi-square dengan degrees of freedom untuk sebuah model (Thacker et al., 1989). Diperlukan chi-square yang tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara varians yang tersirat pada model dan kovariansnya serta varians yang diamati dan kovariansnya cukup kecil karena fluktuasi sampel. Model dengan chi-square besar mungkin masih fit jika indeks kecocokan tinggi, karena ukuran ini sangat tergantung pada ukuran sampel (Joreskog dan Sorbom, 1989).

Medsker et al. (1994) merekomendasikan bahwa Indeks Comparative Fit Index (CFI) dan Relative Noncentrality Index (RNI) mungkin paling tepat untuk menentukan kualitas kecocokan setiap model dengan data. CFI berkisar dari 0 hingga 1 dan direkomendasikan ketika menilai tingkat kecocokan model tunggal. Nilai lebih besar dari 0.90 menunjukkan kesesuaian model yang cukup baik. RNI mungkin paling tepat ketika membandingkan kecocokan model yang bersaing, dan kisarannya sedikit berbeda dari CFI yaitu dari -1 hingga 1. Selain itu, mengacu pada Ferris et al. (2008), bahwa penilaian model juga dapat dilakukan dengan menilai 2 indeks utama yaitu standardized root-mean-square residual (SRMR) dan comparative fit index (CFI). Standar nilai CFI harus mendekati 0.95 dan nilai SRMR tidak lebih tinggi dari 0.08 untuk menunjukkan kesesuaian model yang baik (good model fit) (Ferris et al., 2008; Hu dan Bentler, 1999).

Kualitas model dapat dinilai lebih lanjut dengan nilai t item dan indeks modifikasi. Setelah fit keseluruhan model telah diukur, masing-masing koefisien model harus dilihat pula secara individual untuk tingkat kecocokan. Dengan memilih tingkat signifikansi yang diinginkan, biasanya $p < .05$ (Bagozzi, Yi, dan Phillips, 1991), peneliti dapat menggunakan nilai t untuk menguji hipotesis nol bahwa nilai sebenarnya dari parameter yang ditentukan adalah nol, dan item-item yang tidak signifikan perlu dihapus. Meskipun nilai t memberikan perkiraan kecocokan untuk parameter yang ditentukan, indeks modifikasi memberikan informasi mengenai parameter yang tidak ditentukan, atau cross loadings, dengan indeks modifikasi besar yang menunjukkan bahwa parameter juga berkontribusi menjelaskan perbedaan pada model.

Item-item dengan indeks 0,05 atau lebih besar harus dihapus dan kemudian analisis diulang. Hasilnya kemudian harus dikroscek kembali, terutama berfokus pada nilai t untuk semua loadings yang ditentukan. Jika semua loadings yang sesuai signifikan pada $p < 0.05$ atau kurang, dan besarnya setiap cross loadings yang tidak tepat seperti yang ditunjukkan oleh indeks modifikasi relatif kecil, peneliti mendapatkan bukti bahwa data tersebut sesuai dengan model dengan cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini, analisis faktor konfirmatori memungkinkan peneliti menilai secara kuantitatif kualitas struktur faktor yang memberikan bukti lebih lanjut tentang validitas konstruk dari item pengukuran baru yang dibentuk. Hasil harus memenuhi minimal statistik chi-square, degrees of freedom, dan indeks goodness-of-fit untuk setiap model. Selain itu, penting pula untuk melaporkan hasil factor loadings dan nilai t bersama dengan hasil statistik akhir.

3.3 Pengukuran Dimensi tiap Model dan Indexing

3.3.1 Pengumpulan Bahan melalui data sekunder dan primer

Mekanisme pengukuran dimensi indeks pendidikan dilaksanakan melalui dokumen sekunder yang berasal dari Badan Penyelenggara Statistik atau Report Based dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah terkait. Mekanisme pengumpulan data selanjutnya adalah penelitian survei melibatkan pengumpulan informasi dari sampel individu melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan. Penelitian survei memiliki popularitasnya yang berkelanjutan pada keserbagunaan, efisiensi, dan generalisasinya. Pertama dan terpenting adalah keserbagunaan metode survei. Para peneliti telah menggunakan metode survei untuk menyelidiki bidang pendidikan yang beragam seperti desegregasi sekolah, prestasi akademik, praktik mengajar, dan kepemimpinan. Meskipun survei bukanlah metode yang ideal untuk mempelajari setiap proses pendidikan, survei yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hampir semua masalah pendidikan. Survei Nasional 2000 mencakup berbagai topik tentang pengajaran matematika dan sains, dan hampir tidak ada topik lain yang menarik bagi para pendidik yang belum pernah dipelajari dengan metode survei. Survei efisien karena banyak variabel dapat diukur tanpa secara substansial meningkatkan waktu atau biaya. Data survei dapat dikumpulkan dari banyak orang dengan biaya yang relatif rendah dan, tergantung pada desain survei, relatif cepat. Metode survei cocok untuk pengambilan sampel probabilitas dari populasi besar. Dengan demikian, penelitian survei sangat menarik ketika generalisasi sampel merupakan tujuan utama penelitian. Faktanya, penelitian survei seringkali merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk mengembangkan gambaran yang representatif tentang sikap dan karakteristik populasi yang besar.

Check, J., & Schutt, R.
K. (2011). Chapter 8

Questionnaire Design



Pertahankan Fokus yang Konsisten

Survei harus dipandu oleh konsepsi yang jelas tentang masalah penelitian yang diteliti dan populasi yang akan dijadikan sampel. Sepanjang proses desain kuesioner, tujuan penelitian harus menjadi dasar utama untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dimasukkan dan dikecualikan dan apa yang harus ditekankan atau diperlakukan.



Kembangkan dari Instrumen yang Ada

Survei sering kali menyertakan pertanyaan yang tidak relevan dan gagal memasukkan pertanyaan yang, disadari kemudian, sangat penting bagi peneliti. Satu cara untuk memastikan bahwa pertanyaan yang mungkin relevan diajukan adalah dengan menggunakan pertanyaan yang disarankan oleh penelitian sebelumnya, teori, pengalaman, atau ahli (termasuk peserta) yang memiliki pengetahuan tentang pengaturan yang sedang diselidiki.



Saring dan Uji Pertanyaan

Pengujian pertanyaan sebelum pelaksanaan survey



Order the Questions

Urutan pertanyaan dalam survei penting. Sebagai langkah pertama, pertanyaan individu harus dipilah ke dalam kategori tematik yang luas, yang kemudian menjadi bagian terpisah dalam kuesioner



Buat Kuesioner Menarik

Kuesioner yang menarik — rapi, jelas, bersih, dan luas — lebih mungkin diisi dan cenderung tidak membingungkan responden atau, dalam sebuah wawancara, pewawancara.

3.3.2 Penyusunan Indeksasi

Mekanisme penyusunan indeks pendidikan adalah menggunakan rata-rata geometrik. metode agregasi Indeks Pendidikan menggunakan rata-rata geometrik dibandingkan rata-rata aritmatik bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif maka setiap indikator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Formulasi Indeks Pendidikan adalah agregasi menggunakan rata-rata geometrik sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt[n]{\text{Indek Dimensi (1)} \times \dots \times \text{Indeks Dimensi ke } - n} \times 100$$

Indeks Pendidikan memiliki nilai 1-100 dengan intepretasi bahwa semakin besar nilai P maka kualitas pendidikan semakin optimal terhadap seluruh dimensi layanan pendidikan sedangkan nilai P yang semakin rendah mengindikasikan kualitas pendidikan tidak optimal di seluruh atau sebagian dimensi layanan pendidikan.

BAB 4 ANALISA DAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

4.1

Model Pengukuran Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan setiap tahun oleh Program Pembangunan PBB. Selain indikator Ekonomi dan Indeks Harapan Hidup, membantu mengukur pencapaian pendidikan, GNI (PPP) per kapita dan harapan hidup juga digunakan dengan indeks pendidikan untuk mendapatkan IPM masing-masing negara. Sejak 2010, indeks pendidikan telah diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah orang dewasa dengan tahun sekolah yang diharapkan untuk siswa di bawah usia 25 tahun, masing-masing menerima bobot 50%. Sebelum 2010, indeks pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan gabungan rasio partisipasi kasar sekolah dasar, menengah, dan tersier (dengan bobot sepertiga). United Nations Development Programme dalam *Human Development Reports* menerjemahkan indeks pendidikan sebagaimana berikut:

Education index is an average of mean years of schooling (of adults) and expected years of schooling (of children), both expressed as an index obtained by scaling with the corresponding maxima.

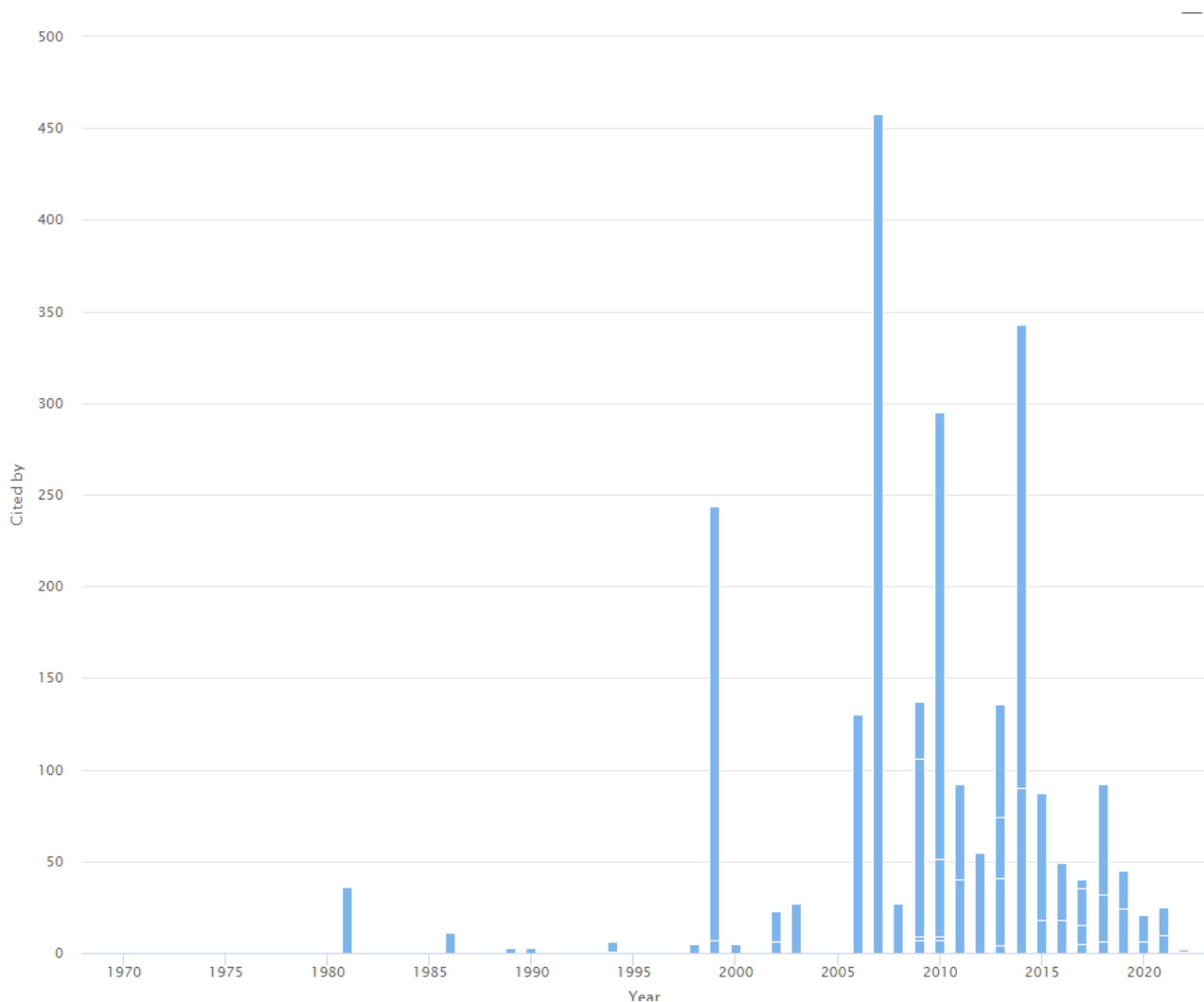
Penerjemahan kualitas pendidikan menggunakan definisi ini dalam dewasa ini mendapat tantangan dan kritik dari para sarjana terutama pengakuan terhadap urgensi pendidikan yang tidak hanya dapat dipandang dari lama sekolah namun dipengaruhi berbagai dimensi seperti akses, teknologi, sumber daya manusia tenaga ajar, bahkan keberpeihakan pemerintah. Bahkan dalam agenda SDG'S 2030, Pendidikan dianggap sebagai jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.

Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era society 5.0 maupun industry 4.0. Adanya society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan tahapan-tahapan kegiatan pendidik dan peserta didik

dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Tahapan-tahapan ini yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran (Hanafy et al., 2014). Adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 maka diperlukan suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan revolusi 4.0 maupun society 5.0 itu sendiri.

Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era Society 5.0, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau lebih dikenal dengan sebutan “Tree R” (reading, writing, arithmetic), tetapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan “*Four Cs*”, yaitu *communicators, creators, critical thinkers, and collaborators*. Kompetensi kreatif, kritis, fleksibel, terbuka, inovatif, tangkas, kompetitif, peka terhadap masalah, menguasai informasi, mampu bekerja dalam “*team work*” lintas bidang, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dapat dijadikan modal untuk menghadapi kondisi kemasyarakatan atau Society 5.0. Era society 5.0 ditandai peningkatan program digitalisasi yang didukung oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing. Kondisi kehidupan masyarakat era society 5.0 sangat berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia termasuk pada bidang pendidikan. Implikasi konsep society 5.0 terhadap pendidikan diantaranya adalah tuntutan pembaharuan kompetensi yang dibelajarkan kepada peserta didik untuk disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat era society 5.0 dan termasuk juga model pembelajarannya di sekolah. Model pembelajaran yang didasarkan pada paradigma bahwa peserta didik adalah individu yang belum dewasa, individu yang pasif sebagai objek dalam proses interaksi belajar mengajar, dan menempatkan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, tidak lagi memadai untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi era society 5.0. Model pembelajaran yang menekankan pada proses deduksi, proses transfer pengetahuan oleh guru kepada peserta didik tidak mampu menjangkau percepatan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan perkembangan paradigma tentang kualitas pendidikan ini peneliti melaksanakan *Systematic Literature Review* dengan memanfaatkan mekanisme SLR Transfiled (2003) dengan kata kunci meliputi *Education Index, Eduaction Quality, Education Quality Measurement, Education Practices Dimension*. Penelusuran jurnal bereputasi dilaksanakan pada database scopus hingga akhirnya ditemukan 309 jurnal terkait indeks pendidikan.



Gambar 4.1 Citasi publikasi data pendukung jurnal.¹⁰

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* diperoleh berbagai penerjemahan kunci terkait kualitas pendidikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang inklusif sebagaimana berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan diukur meliputi kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi pedagogi, keberpihakan negara dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur serta akses biaya, capaian dan capaian lanjutan peserta pendidik (Lim et al, 2018; Borgn, 2021, Cassandra, 2022)
2. Layanan pendidikan menginterpretasikan perkembangan teknologi sebagai kualitas dialog dan media pembelajaran (Griva and Tissen, 2020)

¹⁰ Menunjukkan berapa besar jurnal yang digunakan dalam SLR dicitasi oleh para peneliti lain.

3. Kualitas layanan pendidikan memiliki dimensi infrastruktur, suprastruktur, dan inter-struktur yang merupakan kolaborasi antara institusi kependidikan (Kuhn et al, 2021; Pierson et al, 2007, Dan-Berg, 2017)
4. Kualitas pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara untuk setiap gender dengan memastikan keberpihakan pemerintah dalam memberikan akses (Ma et al, 2022, Stubborg, 2010)

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal didukung Analisa konten dan peer review maka penerjemahan Indeks pendidikan adalah agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi

1. *Achievement outcomes*, Dimensi mengukur kualitas capaian pembelajaran siswa sebagai output langsung layanan pendidikan
2. *Subsequent achievement*, Dimensi mengukur kualitas capaian keberlanjutan sebagai outcome layanan pendidikan
3. *Infrastructure*, Dimensi mengukur kualitas infrastruktur layanan pendidikan sebagai standar proses dan adaptasi teknologi
4. *Human Resource*, Dimensi mengukur kualitas sumber daya manusia dalam standar kualifikasi tenaga ajar dengan nilai tambah kesetaraan gender
5. *Social- Pedagogy Competency* dan Dimensi mengukur kualitas dan kecakapan pengajaran oleh tenaga pendidik
6. *State Partially*. Dimensi mengukur keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi

Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan segenap stakeholder pembangunan melalui indeks pendidikan berusaha untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif sehingga setiap indkator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya setiap dimensi kualitas pendidikan yang telah dirumuskan disusun indicator atau alat ukur yang juga berasal dari hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal. Tahapan selanjutnya dilaksanakan peer review oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian bidang yang sesuai dan melalui tahapan focus Group Discussion yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Gresik. Dimensi dan alat ukur indeks pendidikan kabupaten Gresik dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
Achievement outcomes	Wan et al (2010), Oliver et al (2008), Solovey (2020), Sherwood (2019)	Assesment Nasional	Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK SMP/mts/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK Pendidikan Anak Usia Dini	Data APM APK Kementerian Pendidikan,

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
			(PAUD)	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Standar Isi Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Subsequent achievement	Stufflebeam (2007), Mamoun et al (2019), imaora et al (2019), Coates (2005)	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	BPS
			Rata-rata Lama Sekolah	BPS
		Standar Kelulusan	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Standar Penilaian Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Infrastructure	Kuhn et al, (2021)	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan pendidikan dasaryang berakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			PKBM Terakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Goos and salomon (2017), Shah et al (2016)	Standar Proses Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan	Laporan Standar

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
	Gritsova and Tissen (2020), Azam (2018)	Online Learning	Pendidikan PAUD	Pelayanan Minimal
			Akses pembelajaran secara digital	Survey
			Dialog Pembelajaran	Survey
Human Resource	Mandal et al (2019), Lim et al (2018)	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Satuan Pendidikan Dasar	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Kualitas Pendidikan Kesetaraan	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Komptensi Guru sesuai Standar Nasional	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Adeleke (2022), Ma et al (2022)	Kesetaraan Gender	Akses kesetaraan gender	Survei
			Partisipasi kesetaraan gender	Survei
			Manfaat Kesetaraan Gender	Survei
			Kontrol Kesetaraan Gender	Survei
Social- Pedagogy Competency	Gray (1990), Mortmore (1990), Erwin et al., 2013). Adam and Lennan (2021), Goos and Salomon	Perspektif Siswa, Perspektif Guru, dan Perspektif Wali Siswa	Wawasan kependidikan	Survei
			Pemahaman terhadap peserta didik	Survei
			Pengembangan kurikulum	Survei

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
	(2017), shah et al (2016) Kamensky et al (2016), zigalev et al (2014)		Pembelajaran mendidik dan dialogis	Survei
			Pemanfaatan Teknologi informasi	Survei
			Komunikasi efektif dan empatik	Survei
			Penilaian dan evaluasi proses	Survei
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	Survei
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	Survei
State Partially	Gao (2015), Howel, 1999)	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	Data Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan
	Bowe and Hammond (1991), Detert and Jenny (2000), Mandal (2019), Borerro et al(2019),	Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Survei
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	Survei
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	Survei
			Keterbukaan Data	Survei
			Kesiapan Rencana Kerja	Survei

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan	Survey Internal Dinas Pendidikan

Validasi item pengukuran memanfaatkan mekanisme *Exploratory Factor Analysis* dan *Confirmatory Factor Analysis* (EFA-CFA). Dalam tes EFA, nilai item loadings pada faktor laten dapat menjadi bukti yang mendukung sebagai justifikasi teoritis untuk menentukan jumlah item yang dipertahankan,. Tidak ada aturan yang ketat untuk hal ini, tetapi tingkat kriteria 0.400 paling umum digunakan dalam menilai factor loading yang memenuhi kriteria (Ford et al., 1986). Item-item yang memenuhi persyaratan adalah item yang factor loadingnya lebih dari 0,40 dan atau dua kali lebih kuat pada faktor yang sesuai daripada pada faktor lainnya.

Uji EFA dilaksanakan dengan survey terhadap akademisi di bidang manajemen pendidikan sebanyak 81 orang dengan jenis kelamin 56 (69,14%) perempuan dan 25 (30,86%) laki-laki dengan rerata usia 21,3 tahun. Seluruh item pengukuran berada pada kisaran factor loading 0,632-0,782 atau telah memenuhi syarat dengan nilai tertinggi pada Anggaran Pendidikan sedangkan nilai terendah adalah Kontrol Kesetaraan Gender dan dan Dialog Pembelajaran. Selanjutnya uji CFA menunjukkan bahwa semua loadings yang sesuai signifikan pada $p < 0.05$ atau kurang, dan besarnya setiap cross loadings yang tidak tepat seperti yang ditunjukkan oleh indeks modifikasi relatif kecil, peneliti mendapatkan bukti bahwa data tersebut sesuai dengan model dengan cukup baik.

4.2

Hasil Pengukuran Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021

Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 mencapai nilai 73,41. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia¹¹ maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi. Capaian tertinggi indeks pendidikan Kabupaten Gresik pada dimensi *Achievement outcomes* dengan nilai 82,34 (kategori sangat tinggi) sedangkan dimensi infrastruktur tertinggal jauh mencapai 57,58. Keempat dimensi lainnya *Subsequent achievement*, *Human Resource*, *Social- Pedagogy Competency*, *State Partially* berada pada kategori tinggi dengan rentang capaian 72-77.

Tabel 4.2 Capaian Indeks pendidikan per dimensi

No.	Dimensi	Aggregate
1.	<i>Achievement outcomes</i>	82,34
2.	<i>Subsequent achievement</i> ,	77,39
3.	<i>Infrastructure</i>	57,58
4.	<i>Human Resource</i> ,	77,51
5.	<i>Social- Pedagogy Competency</i> ,	72,68
6.	<i>State Partially</i>	75.73

Adapun hasil pengukuran terhadap setiap item secara rinci dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Capaian Indeks Pendidikan per Alat Ukur

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
1	Achievement outcomes	Assesment Nasional	Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/ MTs/Sederajat (Angka pengganti assessment nasional)	56,95	0	100	56,95
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/sederajat	95,7	0	100	95,7

¹¹ Klasifikasi Indeks Pendidikan (mengadopsi interval IPM)

Interval Nilai	Kriteria
>80	Sangat Tinggi
70-79	Tinggi
60-69	Sedang
<60	Rendah

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Sederajat	74,4	0	100	74,4
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	101,17	0	100	100
			APK SMP/mts/ sederajat	91,89	0	100	91,89
			APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,3	0	100	74,3
		Standar Isi Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	88,87	0	100	88,87
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	78,63	0	100	78,63
			Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	89,1	0	100	89,1
2	Subsequent achievement	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	13,3	0	18	73,9
			Rata-rata Lama Sekolah	9,29	0	15	61,9
		Standar Kelulusan	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	87,99	0	100	87,99
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	77,99	0	100	77,99

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
3	Infrastructure	Standar Penilaian Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	87,99	0	100	87,99
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	77,78	0	100	77,78
		Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	41,89	0	100	41,89
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	97,09	0	100	97,09
			PKBM Terakreditasi minimal C	11,76	0	100	11,76
		Standar Proses Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	89,96	0	100	89,96
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	79,49	0	100	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	83,31	0	100	83,31
		Online Learning(Perspektif Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	6,24	0	10	62,4
			Dialog Pembelajaran	6,42	0	10	64,2
		Online Learning (Perspektif Guru)	Akses pembelajaran secara digital	8,62	0	10	86,2

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Dialog Pembelajaran	8,83	0	10	88,3
		Online Learning(Perspektif Wali Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	4,22	0	10	42,2
			Dialog Pembelajaran	3,62	0	10	36,2
4	Human Resource	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV	79,27	0	100	79,27
			8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	97,03	0	100	97,03
			Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV	57,14	0	100	57,14
		Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	90,83	0	100	90,83
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	79,49	0	100	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	83,17	0	100	83,17
		Kesetaraan Gender (Perspektif Siswa)	Akses kesetaraan gender	7,25	0	10	72,5
			Partisipasi kesetaraan gender	8,23	0	10	82,3

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
5	Social-Pedagogy Competency	Kesetaraan Gender (Perspektif Guru)	Manfaat Kesetaraan Gender	7,81	0	10	78,1
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,82	0	10	68,2
			Akses kesetaraan gender	8,62	0	10	86,2
			Partisipasi kesetaraan gender	9,21	0	10	92,1
			Manfaat Kesetaraan Gender	8,62	0	10	86,2
			Kontrol Kesetaraan Gender	8,45	0	10	84,5
		Kesetaraan Gender (Perspektif Wali Siswa)	Akses kesetaraan gender	7,44	0	10	74,4
			Partisipasi kesetaraan gender	6,44	0	10	64,4
			Manfaat Kesetaraan Gender	6,63	0	10	66,3
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,62	0	10	66,2
		Perspektif Siswa	Wawasan kependidikan	7,22	0	10	72,2
			Pemahaman terhadap peserta didik	7,68	0	10	76,8
			Pengembangan kurikulum	6,43	0	10	64,3
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	7,41	0	10	74,1
			Pemanfaatan Teknologi informasi	6,54	0	10	65,4
			Komunikasi efektif dan empatik	6,82	0	10	68,2

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Penilaian dan evaluasi proses	6,92	0	10	69,2
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,13	0	10	71,3
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	7,27	0	10	72,7
	Perspektif Guru		Wawasan kependidikan	8,65	0	10	86,5
			Pemahaman terhadap peserta didik	8,32	0	10	83,2
			Pengembangan kurikulum	7,86	0	10	78,6
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	8,45	0	10	84,5
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,63	0	10	76,3
			Komunikasi efektif dan empatik	8,24	0	10	82,4
			Penilaian dan evaluasi proses	8,41	0	10	84,1
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	8,71	0	10	87,1
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,12	0	10	81,2
	Perspektif Wali Siswa		Wawasan kependidikan	7,63	0	10	76,3
			Pemahaman terhadap peserta didik	6,42	0	10	64,2
			Pengembangan kurikulum	6,32	0	10	63,2
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	6,52	0	10	65,2

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Pemanfaatan Teknologi informasi	5,73	0	10	57,3
			Komunikasi efektif dan empatik	6,14	0	10	61,4
			Penilaian dan evaluasi proses	7,23	0	10	72,3
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	6,84	0	10	68,4
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	6,82	0	10	68,2
6	State Partially	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	31,82	20	>20	100
		Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	7,47	0	10	74,7
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	7,61	0	10	76,1
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	6,72	0	10	67,2
			Keterbukaan Data	6,82	0	10	68,2
			Kesiapan Rencana Kerja	7,24	0	10	72,4
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan		0	100	1

Penjelasan Tiap Item Pengukuran

1. Assessment Nasional

Dikutip dari laman *kemdikbud.go.id*, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Selain itu juga dinilai dari kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Secara garis besar Asesmen Nasional mengevaluasi dan memetakan em pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yakni:

1. Asesmen Kompetensi Minimum
Mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif.
2. Survei Karakter
Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar nonkognitif.
3. Survei Lingkungan Belajar
Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.

Dalam pengukuran Indeks Pendidikan Tahun 2021, nilai assessment nasional belum ada sehingga memanfaatkan Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/ MTs/Sederajat

2. Angka Partisipasi Murni

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SD =

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

APM SMP =

$$\frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

APM SM =

$$\frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

APM PT =

$$\frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Sumber data APM berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik

3. Angka Partisipasi Kasar

APK dapat di definisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

$$\text{APK PAUD} = \frac{\text{Jumlah murid PAUD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 Tahun}} \times 100\%$$

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sumber data APK berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik

4. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi sebagaimana dirumuskan berdasarkan: a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. konsep keilmuan; dan c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

5. Harapan Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

P15+ = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-I meliputi

Tidak pernah sekolah : 0

Masih sekolah SD-S1 : konversi ijazah terakhir +kelas terakhir -1

Masih sekolah S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir +
lkelas terakhir-1

6. Standar Kelulusan

Standar kompetensi lulusan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

7. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta Didik

8. Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi

Penilaian terhadap satuan pendidikan dengan nilai minimal akreditasi C berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dengan rincian Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C, Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal, PKBM Terakreditasi minimal C

9. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

10. Online Learning

Online learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap online learning dilakukan

melalui survey secara digital terhadap perspektif siswa dengan sample (48 orang), guru (32 orang) dan wali siswa (42 orang). Penilaian online learning meliputi kemudahan akses dan dialog pembelajaran.

11. Kualifikasi standar tenaga pendidik

Kualifikasi standar tenaga pendidik berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan dengan ketentuan minimal Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV; Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV, dan Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV

12. Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional

Standar pendidik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.

13. Kesetaraan Gender

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Penilaian terhadap kesetaraan gender dilakukan melalui survey secara digital terhadap perspektif siswa dengan sample (48 orang), guru (32 orang) dan wali siswa (42

orang). Instrumen meliputi akses kesetaraan gender, partisipasi kesetaraan gender, manfaat kesetaraan gender, dan kontrol kesetaraan gender.

14. Social-Pedagogy Competency

Bidang pedagogi adalah salah satu bidang yang lebih sulit di mana penilaian kualitas pendidikan dapat dibuat. Hal ini karena kompleksitas proses pembelajaran, subjek - apa adanya - begitu banyak pengaruh yang berbeda dan sumber informasi yang berbeda. Beberapa murid tampak belajar karena kualitas pengajaran yang ditawarkan; orang lain tampaknya belajar meskipun itu! Konteks di mana pedagogi dialami akan sedikit berbeda untuk setiap pelajar potensial, mewakili, seperti halnya, campuran perbedaan konstitusional, sikap dan motivasi serta jumlah dan tingkat pembelajaran sebelumnya yang unik (Mortmoore, 1990). **Kompetensi Pedagogik** pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. **Kompetensi Pedagogik** merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Kompetensi pedagogik merujuk pada Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi hasil belajar; dan
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap kemampuan pedagogi dilakukan melalui survey secara digital terhadap perspektif siswa dengan sample (36 orang), guru (32 orang) dan wali siswa (30 orang). Instrumen meliputi Wawasan kependidikan; Pemahaman terhadap peserta didik; Pengembangan kurikulum; Pembelajaran mendidik dan dialogis; Pemanfaatan Teknologi informasi; Komunikasi efektif dan empatik; Penilaian dan evaluasi proses; Evaluasi kepentingan pembelajaran; Reflektif peningkatan kualitas belajar.

15. Education Budget

Penilaian terhadap rasio anggaran belanja pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008.

16. Educational and support process management

Penilaian terhadap keberpihakan pemerintahan Daerah dalam manajemen pendidikan melalui survey yang dilakukan kepada 78 orang (tenaga pendidik, tenaga administrasi, wali siswa, dan akademisi) dengan menunjukkan penilaian oleh responden meliputi instrument:

- a. Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kesiapan regulasi dan kelengkapan pengaturan di tingkat Daerah dalam mengakomodasi perubahan regulasi pusat dan provinsi.
- b. Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kepastian pelaksanaan regulasi dalam pelayanan pendidikan, perizinan pelayanan pendidikan.
- c. Kontrol (Pengawasan dan Monitoring);
Meliputi tentang transparansi biaya pendidikan tanpa ada pungutan liar, pengawasan terhadap pelanggaran siswa dan tenaga pendidik, pengawasan terhadap pelanggaran kebijakan.
- d. Keterbukaan Data;
Meliputi kemudahan akses data pendidikan.
- e. Kesiapan Rencana Kerja.
Meliputi ketersediaan rencana kerja pendidikan di lingkup dinas dan sekolah yang dapat diakses.

Dalam dimensi terdapat instrument Kepuasan Pelayanan Pendidikan berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai instrument ini tidak diperoleh karena belum dilaksanakan oleh dinas Pendidikan

BAB 5 REKOMENDASI

Penerjemahan kualitas pendidikan dilaksanakan secara inklusif mempertimbangkan terhadap urgensi pendidikan yang tidak hanya dapat dipandang dari lama sekolah namun dipengaruhi berbagai dimensi seperti akses, teknologi, sumber daya manusia tenaga ajar, bahkan keberpeihakan pemerintah. Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era society 5.0 maupun industry 4.0. Adanya society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, sebagaimana diamanahkan dalam Agenda 2030, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.

Berdasarkan serangkaian tahapan akademis, Indeks pendidikan Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social- Pedagogy Competency dan State Partially*. Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 mencapai nilai 73,41. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 dirumuskan serangkaian rekomendasi berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik segera memfasilitasi *Assessment Nasional*;
2. Harapan lama sekolah selama 13,3 tahun dan rata-rata lama sekolah 9,29 tahun telah berada di atas rerata nasional dengan nilai RLS mencapai 8,54 tahun dan HLS mencapai 13,08 tahun. Meskipun demikian, sebagai indicator kunci pembangunan manusia maka keberpihakan pemerintah Daerah sangat krusial untuk mendorong pencapaian lama sekolah masyarakat Gresik terutama bersaing dalam era pasca pandemi, society 5.0 dan industry 4.0;

3. Peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat dan mengubah mekanisme pembelajaran sehingga lebih adaptif;
4. Penilaian kesetaraan gender oleh siswa dan wali siswa masih rendah sehingga perlu ditelusuri dengan perangkat Daerah untuk menguatkan pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan. Pengarusutamaan Gender harus didukung dengan data terpilah Gender;
5. Kemampuan pedagogi guru disorot oleh siswa dan wali siswa sehingga perlu dipertimbangkan untuk menyusun peningkatan kapasitas yang lebih adaptif di era digital saat ini;
6. Diperlukan pengukuran kepuasan pelayanan pendidikan melandasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Direkomendasikan untuk perlu pendampingan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya seperti kegiatan *Parenting*, pelatihan tenaga pengajar dan orang tua siswa diarahkan kepada Pendidikan inklusif.
8. Peningkatan nilai variable infrastruktur sarana prasarana Pendidikan bisa melalui CSR di kabupaten Gresik;
9. Pemerataan pengembangan sarana Pendidikan khususnya di wilayah kepulauan Bawean, mulai diperkenalkan sektor pembelajaran berbasis Bahasa asing dan pariwisata.

Selain substansial berdasarkan hasil indeks, dirumuskan rekomendasi secara teknis dalam penyusunan dan pengukuran indeks yaitu mengurangi asistemetris informasi dan perluasan responden serta jangka waktu survey.